

Teologi Kebangsaan: Sebuah Tafsir atas Sila Ketuhanan Yang Maha Esa

Edward Everson Hanock¹, Indria Samego², Martina Novalina³

¹Sekolah Tinggi Teologi Makedonia Ngabang, Kalimantan Barat

^{2,3}Sekolah Tinggi Teologi Ekumene Jakarta

Correspondence: edwardhanock@makedonia.ac.id

Abstract: Since the last 2 (two) decades, Pancasila has received a sharp spotlight in the midst of its finality as the ideology of the Indonesian nation. This shows that the perspective on Pancasila has not depicted an encouraging and constructive trend. If it is specified again, then the spotlight actually leads to the first precept: "Belief in the One Supreme God". This first precept is always brought to the surface as a point of contention as if the discussion has not yet reached a mutual agreement from fellow components of the nation. The word 'Divinity' is the trigger. By using the qualitative-descriptive method, differences of opinion that develop in the community, both descriptively and normatively will be studied critically and constructively. It is a necessity to make the precepts of the One and Only God as a theological meeting point in the frame of national theology.

Keywords: godhead; Pancasila; national theology; the first principle

Abstrak: Sejak 2 (dua) dekade terakhir ini, Pancasila mendapat sorotan yang tajam di tengah finalitasnya sebagai ideologi bangsa Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa cara pandang terhadap Pancasila belum menggambarkan trend menggembirakan dan konstruktif. Bila dispesifikan lagi, maka sorotan tersebut sebenarnya mengarah pada sila pertama: "Ketuhanan Yang Maha Esa". Sila pertama ini selalu diangkat ke permukaan sebagai titik tengkar, seolah-olah pembahasannya belum juga mencapai kesepakatan bersama dari sesama komponen bangsa. Kata 'Ketuhanan' menjadi pemicunya. Dengan menggunakan metode kualitatif-deskriptif, perbedaan-perbedaan pendapat yang berkembang di tengah-tengah masyarakat, baik secara deskriptif maupun normatif akan dikaji secara kritis dan konstruktif. Adalah sebuah keniscayaan menjadikan sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai titik temu teologis dalam bingkai teologi kebangsaan.

Kata Kunci: ketuhanan Pancasila; sila pertama; teologi kebangsaan

PENDAHULUAN

Meskipun sudah final sebagai dasar sekaligus ideologi negara, Pancasila justru tidak pernah sepi dari sorotan bernada optimis dan sinis dalam beberapa tahun terakhir ini. Rasa optimisme misalnya terkait dengan keberagaman bangsa Indonesia yang terjalin apik menjadi satu. Di sisi lainnya, terlihat juga sinisme melihat Pancasila, karena dianggap tidak mampu mengejawantakan keyakinan agama secara utuh. Dari perspektif optimisme, nilai-nilai Pancasila perlu secara berkesinambungan dan konsisten diperkuat di tengah-tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Berbanding terbalik dengan sinisme yang berusaha melemahkan semangat kesatuan dalam keberagaman itu melalui upaya membenturkannya dengan ideologi lainnya,

yang dinilai lebih agamais darinya. Di balik usaha tersebut sebenarnya terendus keinginan yang kuat untuk menggantinya.¹

Pada tahun 2017 sila pertama ini pernah menjadi kontroversi karena pernyataan yang dilontarkan terkait dengannya. Kontroversi ini bukan seolah-olah mengulang peristiwa sejarah perumusan Pancasila. Karena perbedaan pendapat pada masa itu mampu dikelola dengan baik, hingga membuahkan hasil yang merekatkan seluruh anak bangsa. Kebalikan dari itu adalah 'keluarnya' penghayatan atas Pancasila dari 'pakem' sebagai titik temu kebangsaan, ke titik tengkar yang berpotensi besar menimbulkan konflik sosial dan agama.

Sebagai contoh, pernyataan dari Mohammad Rizieq Shihab,² yang memberi penilaian atas rumusan sila pertama ini, antara rumusan versi Sukarno dan Piagam Djakarta. Di dalam rumusan Piagam Djakarta, kata 'Ketuhanan' mendapat tambahan 7 (tujuh) kata: "dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya".³ Baginya, rumusan Pancasila versi Piagam Djakarta adalah rumusan yang tulen, sedangkan rumusan versi Sukarno sama sekali tidak.⁴ Mengenai perbedaan pendapat soal rumusan sila pertama sudah tidak lagi relevan sekarang, karena Pancasila sudah final dan sudah diterima secara ikhlas oleh para pendiri bangsa ini. Komentar lainnya yang diutarakan oleh Eggie Sudjana yakni 'hanya' Islam yang cocok dengan sila pertama Pancasila,⁵ berimplikasi pada kesimpulan bahwa agama-agama di luar Islam tidak berhak mengklaim sila tersebut; bahkan, menurutnya, ada konsekuensi logis dari itu, yakni Kristen, Hindu, Budha, juga dapat dibubarkan karena tidak sesuai dengan sila pertama.⁶ Kedua pandangan ini bukan pandangan yang baru, pasca reformasi, sebagai sebuah pemikiran *brilliant*. Perdebatan di awal-awal perumusan sila-sila Pancasila sudah menunjukkan bahwa keputusan bersama untuk menerima Pancasila adalah keputusan bersama untuk meletakkan isu-isu provokatif berbalut SARA. Mengangkat dasar dan ideologi negara ini, yakni Pancasila, menjadi komoditi politik yang mendorong superioritas satu keyakinan (agama) atau suku tertentu akan berbahaya. Apa yang terjadi di awal-awal perumusan Pancasila dapat menjadi pelajaran yang berharga bagaimana para pendiri bangsa ini mengelola perbedaan dengan baik dan dewasa, baik secara politik, agama, dan budaya.

Harus diakui di sini bahwa pokok penelitian Pancasila, termasuk sila pertama, sudah banyak dilakukan. Publikasinya melalui jurnal-jurnal ilmiah dan buku dapat diakses dengan luas. Ada beberapa penelitian sebelumnya yang akan saya kemukakan di sini dari sudut pandang yang berbeda, misalnya: *pertama*, publikasi Febri Hijroh Mukhlis menyoroti soal Pancasila yang harus menjadi dasar teologis bagi agama-agama yang menerimanya sehingga tidak perlu lagi merasa 'berbeda' dari yang lain, karena bagaimanapun agama merupakan salah satu dari 3 (tiga) yang terlibat dalam perumusan itu. Dua di antaranya adalah politik dan budaya.⁷ *Kedua*, Erman S. Saragih lebih spesifik lagi mengkaji sila pertama. Saragih melakukan analisis guna memaknai *teologi* dari kata Ketuhanan pada sila tersebut dalam konteks pluarisme agama, yang kemudian bermuara pada perlunya sudut pandang kemajemukan,

¹ Syaiful Arif, "Kontradiksi HTI Atas Pancasila," *Jurnal Keamanan Nasional* 2, no. 1 (2016): 19–34.

² "Perjalanan Kasus Penghinaan Pancasila Rizieq Syihab | Kumparan.Com."

³ "Piagam Jakarta: Isi Dan Kontroversinya Halaman All - Kompas.Com."

⁴ M. Iqbal Maula, "Pandangan Muhammad Rizieq Shihab Tentang Pancasila," *Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama* 2, no. 2 (2020): 71–88.

⁵ "Begini Ucapan Eggie Sudjana Yang Dianggap Bisa Membuat Kegaduhan - Nasional Tempo.Co."

⁶ "Eggie Sudjana: Trinitas Kristen Bertentangan Dengan Sila Pertama Pancasila."

⁷ Febri Hijroh Mukhlis, "Teologi Pancasila: Teologi Kerukunan Umat Beragama," *Fikrah* 4, no. 2 (2016): 171.

menaruh perhatian pada sifat-sifat Tuhan, dan hasil sejarah.⁸ *Ketiga*, publikasi Syaiful Hakam menarik karena ia melakukan sebuah kajian interpretatif atas sila pertama ini. Menurutnya, arti yang tepat dari sila tersebut adalah pengakuan akan kemahakuasaan Tuhan.⁹ *Keempat*, kajian interpretatif Hakam di atas memiliki topik yang sama dengan kajian dan publikasi Wira Atma Hajri, dan kawan-kawan. Sekalipun demikian, Hajri dkk. tidak memberi sentuhan berbeda pada interpretasi mereka atas sila pertama ini. Perluasan tafsir dilakukan berdasar pada perundang-undangan, kasus, konsep, kesejarahan, aspek politis, serta komparasi perumusan sila pertama. Hajri dkk. juga menggarisbawahi perlunya penafsiran yang proper berbekal data historis-sistematis-gramatikal.¹⁰ *Kelima*, kajian Novalina bahwa Pancasila, terutama sila pertama dapat menjadi bingkai keberagamaan yang ada di Indonesia dalam melihat masalah fundamentalisme.¹¹ Penelitian Hajri dkk. hanya bermuara pada temuan tentang adanya kesalahan paradigma/pengertian atas sila pertama, bukan pada pemaknaan seperti halnya dilakukan oleh Mukhlis, Saragih, dan Hakam.

Walaupun pokok penelitian ini sama dengan beberapa penelitian sebelumnya, perlu juga sudut pandang lainnya. Itulah sebabnya saya mengangkat pokok ini dari sisi 'teologi kebangsaan'. Teologi kebangsaan lahir dari pemaknaan atas sila pertama sekaligus sebagai konsekuensi dari kata 'Ketuhanan' terlepas dari diskursus atas tambahan di belakang kata itu, baik menurut versi Soekarno, Piagam Jakarta, maupun rumusan lainnya dan urutan atau kedudukan sila itu sebelum secara final diterima, sebagaimana kemudian terlihat dalam pembukaan UUD 1945. Teologi kebangsaan seperti apa yang dapat disaripatkan dari sila pertama ini?

METODE

Artikel ini menggunakan metode kualitatif. Data berupa dokumen (buku-buku, artikel, berita-berita dari media massa) yang dikumpulkan akan dianalisis dan dideskripsikan guna melihat isu ini secara komprehensif agar kajian atas penghayatan sila pertama Pancasila ini dapat menjawab bermuara pada teologi kebangsaan.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Kebangsaan

Kebangsaan yang mendapat sentuhan dari kata teologi dalam kerangka 'Ketuhanan' pada sila pertama ini, secara konseptual menurut Anthony D. Smith berkaitan dengan beberapa aspek yang saling terkait, yang kemudian memungkinkan seseorang memahaminya dengan baik. Sekurang-kurangnya ada 5 (lima): proses terbentuknya bangsa, kesadaran atas rasa memiliki sebuah bangsa, bahasa dan symbol dari bangsa, sebuah gerakan sosial dan politis atas nama bangsa itu sendiri; dan, ideologi bangsa, baik secara umum maupun khusus.¹² Smith lalu mendefinisikan kebangsaan sebagai sebuah ideologi yang berusaha menempatkan 'bangsa' di pusat kesadarannya lalu bergerak ke arah jalan pencarian untuk mengenalkan keberadaan

⁸ Erman Sepniagus Saragih, "Analisis Dan Makna Teologi Ketuhanan Yang Maha Esa Dalam Konteks Pluralisme Agama Di Indonesia," *Jurnal Teologi Cultivation* 2, no. 1 (2018): 1–14.

⁹ Saiful Hakam, "The Interpretation of the First Verse [Ketuhanan Yang Maha Esa] of Pancasila," *Jurnal Ilmu Agama: Mengkaji Doktrin, Pemikiran, dan Fenomena Agama* 18, no. 1 (2017): 1–10.

¹⁰ Wira Atma Hajri, Zulherman Idris, and Masriko Riantono, "Meluruskan Penafsiran Tentang Pancasila," *WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi* 5, no. 2 (2019): 50–57.

¹¹ Martina Novalina, *Di Bawah Kepak Sayap Sang Garuda (Pemahaman, Sikap Dan Tindakan Fundamental Keber-Agama-an Dalam Bingkai Pancasila)*, ed. Tim STT Ekumene, 1st ed. (Jakarta: Rebot Literature, 2018).

¹² Anthony D. Smith, *Nationalism: Theory, Ideology, History*, 2nd Editio. (Cambridge, UK: Polity Press, 2010), 5–8.

bangsa itu sendiri.¹³ Artinya, antara aspek-aspek di atas dan kebangsaan itu sendiri masih terdapat isu penting yang menyoal tentang terbentuknya suatu bangsa hingga dinyatakan ia eksis (ada). Kebangsaan bisa saja bertolak dari belum lahirnya atau belum terbentuknya sebuah bangsa melalui proses-proses seperti proklamasi kemerdekaan dari penjajahan atau dalam perspektif Smith sebagai tujuan politis.¹⁴ Kebangsaan dapat bertumpuh pada budaya dan masyarakat. Inilah titik tumpuh dari kebangsaan yang ideal, yang sering kembali kepada hubungannya dengan isu-isu kultural dan pencarian satu ideologi yang merekatkan masyarakat hingga terlahirnya sebuah bangsa. Satu ideologi itu tidak dapat bercampur dengan 'banyak' ideologi. Mau tidak mau harus mengabaikan banyak ideologi dan memilih satu yang ideal untuk menyatakan seluruh komponen masyarakat ke dalam bangsa yang beridentitas dan bermartabat. Dalam hal ini, Indonesia menjadi potret sejarah, selain Tanzania dan Nigeria, sebagai negara-negara post-kolonial, tentang pergerakan dari kebangsaan menuju bangsa yang merdeka dengan ideologi yang ideal dan menjadi tumpuan dari keberagaman budaya, bahasa, agama, dan suku. Inilah yang disebut oleh Smith sebagai tujuan nasional yang dapat mengenalkan berdirinya sebuah bangsa, yang ia rangkum dalam tiga tingkatan: *otonom*, *bersatu*, dan *beridentitas*.¹⁵

Kebangsaan menurut Hearn adalah sebuah klaim atas nama penduduk untuk identitas, wilayah hukum, daerah teritori.¹⁶ Ia tidak menyertakan ideologi yang berbalut politis di sini melainkan lebih mengedepankan klaim sosial untuk tujuan tertentu, yang sebenarnya bisa juga bermuara pada tujuan-tujuan yang bersifat politis. Klaim sosial sendiri bukan tanpa dasar. Yang memainkan peran penting bisa saja faktor budaya yang tereksprei dalam keyakinan agama, bahasa, hakikat biologis, atau warisan-warisan sejarah budaya yang berabad-abad lamanya. Sama halnya dengan yuridiksi yang mendorong pemenuhan kekuasaan atau otoritas hukum sebagai upaya penguatan dan penegakan hukum yang tercipta dari sebuah kesepakatan sosial-politis. Wilayah kedaulatan tidak kalah penting dalam isu bangsa-kebangsaan, walaupun bagi Hearn ini sebenarnya tidaklah begitu problematis, seperti 2 (dua) hal pertama di atas.¹⁷

Menarik benang merah dari 2 (dua) pandangan di atas akan menunjukkan bahwa kebangsaan suatu bangsa bertolak dari kesepakatan yang bersifat sosio-kultural dengan tujuan yang jelas, yakni ketercapaian cita-cita berdaulatnya masyarakat di dalam konteks kepelbagaiannya, baik keyakinan agama, bahasa, suku, dan budaya dalam wujud sebuah bangsa yang berideologi, berdaulat, beridentitas, dan diterima oleh bangsa-bangsa lain. Indonesia sendiri melalui fase ini dan telah mencapai cita-citanya untuk merdeka, sehingga diterima oleh masyarakat internasional. Kesepakatan para pendiri bangsa untuk menerima dan mengakui Pancasila sebagai 'satu-satunya' dasar dan ideologi negara sesuai dengan konteks dan realitas bangsa ini yang memang berbeda-beda.

Kebangsaan, dalam pidato Soekarno, menempati urutan pertama. Ia menyebut kemerdekaan yang hendak diwujudkan dalam persiapan-persiapan kemerdekaan harus berdiri di atas dasar sebuah negara nasionalis (Belanda: *nationale staat*), di mana rakyat Indonesia berada dalam satu bangsa, meskipun berada dalam kebhinekaan. Kebangsaan (yang merdeka) merupakan cita-cita pertama yang harus diwujudkan. Baru sesudahnya merumuskan dasar negara,

¹³ Smith, *Nationalism: Theory, Ideology, History*.

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Jonathan Hearn, *Rethinking Nationalism: A Critical Introduction*, 2006, 11.

¹⁷ Hearn, *Rethinking Nationalism: A Critical Introduction*.

yang kemudian menjadi entitas bagi rumusan-rumusan sila Pancasila. Soekarno pun menyantumkan kebangsaan sebagai salah satu sila yang berada pertama.¹⁸

Teologi

Substansi kata teologi dalam pemahaman seseorang bukan hanya dibangun dari pemakaian secara etimologis, melainkan bagaimana seseorang memotret teologi dari manusia yang hidup dalam jati dirinya sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa. Manusia, tentu berbeda dari ciptaan-Nya yang lain; dan karena keistimewaannya itu ia dapat memberikan nilai tambah pada pengertian teologi itu sendiri. Teologi sendiri tidak dapat dimonopoli oleh satu agama tertentu atau kelompok masyarakat tertentu yang mengklaim diri memiliki sejarah peradaban yang lama dalam budaya dan persebaran agama. Teologi dapat dimaknai dari pengalaman manusia sebagai makhluk ontologis dengan Tuhan, Penciptanya, dan alam sekitarnya. Penghayatan teologi dan penghayatan kebangsaan akan dilihat dari sisi bahwa manusia seyogyanya menyadari bahwa ia 'berasal' (baca: 'dicitak oleh', bukan titisan para dewa) Allah dan kesadarannya bahwa ia berada di tengah-tengah masyarakat yang heterogen. Bagaimana manusia menginternalisasi teologi dan kebangsaan ini menjadi sangat krusial. Teologi bukan menjadi hakim atas kebangsaan, demikian juga: kebangsaan tidak dikerdilkan hanya karena melihat satu bangsa mesti terlihat dimonopoli oleh satu keyakinan agama tertentu saja. Teologi dan kebangsaan merupakan cetak biru yang menjadi bagian integral manusia sebagai ciptaan Tuhan.

Adanya silang pendapat di antara kedua kelompok yang mengklaim diri rohaniwan atau pemuka-pemuka agama dan kebangsaan mestinya dilihat bukan sebagai dua kutub magnet yang bertolak belakang melainkan sebagai satu daya pikat yang kuat untuk merekatkan komponen-komponen masyarakat yang beragama itu. Keduanya sangat potensial membangun peradaban manusia yang kuat di tengah-tengah masyarakat. Jika ada satu kelompok yang mengampanyekan diri lebih kuat, maka potensi konflik sebenarnya sedang diberikan jalan seluas-luasnya.

Hal serupa itu pernah terjadi di Jerman. Gambaran protes 'teologi' pernah dilontarkan oleh Karl Barth hingga ia tertangkap pesan bahwa ia tidak suka dengan sepak terjang Hitler yang mau menarik gereja ke bawah kekuasaannya (negara). Dengan jalan itulah negara kemudian secara leluasa menyertakan gereja dalam kebijakan negara, bukan sebagai pengambil keputusan, melainkan sebagai supporter. Sekontroversial apa pun, gereja dipastikan tidak bisa *abstain* dari dukungannya.¹⁹ Teologi memang tidak bisa berada di ruang privat, melainkan publik. Tidak bisa juga hanya berwacana, melainkan melakukan aksi nyata di tengah-tengah masyarakat. Pilihan untuk berada berseberangan tidak ideal. Karena bukan soal *ideal berseberangan* yang mestinya diusung, melainkan bagaimana penetrasi teologi ke dalam kehidupan kebangsaan itu secara nyata. Bagaimana teologi menaruh pemaknaan dan implementasi Ketuhanan di tengah-tengah masyarakat yang terus semakin sekular.

Ketuhanan

Ketuhanan, sebagai salah satu sila dari Pancasila, juga merupakan salah satu isi pidato Soekarno pada 1 Juni 1945. Di dalam pidatonya itu, Soekarno menyebut Ketuhanan di bagian akhir dengan tambahan 'yang berkebudayaan', sebagai sebuah 'penggalian sosiologis-historis'

¹⁸ Agustinus W. Dewantara, *Diskursus Filsafat Pancasila* (Yogyakarta: PT Kanisius, 2017), 58, 63.

¹⁹ Carys Moseley, *Nations and Nationalism in The Theology of Karl Barth* (Oxford: Oxford University Press, 2013), 99.

Indonesia dari zaman pra-Hindu hingga menjelang kemerdekaan Indonesia.²⁰ Jika dicermati, maka sila Ketuhanan ini sudah mengalami perubahan 2 (dua) kali, sejak dikemukakan oleh Soekarno. Yang berubah tentunya adalah frasa akhir, yakni 'yang berkebudayaan' menjadi '...dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya' dan '...Yang Maha Esa'. Pemaknaan 'yang berkebudayaan' tidak segera menonjolkan keyakinan yang liar dan dipersalahkan, karena bernuansa animisme. Atau, anggapan bahwa Ketuhanan ini merupakan keyakinan para leluhur yang tidak sejalan dengan nilai-nilai keyakinan yang dianut sekarang. Mungkin perlu merelaksasi Ketuhanan ini dari diskursus kaku agamis, ke arah cerminan nilai-nilai ketaqwaan yang tidak terpisahkan dari bangsa Indonesia. Karena Ketuhanan bukanlah sebuah produk yang diciptakan sekelompok orang, melainkan sebuah pernyataan TUHAN Yang Maha Kuasa yang kemudian diakui dan dipercayai.

Sila pertama ini memang multitafsir.²¹ Termasuk di dalamnya adalah keberatan terhadap pemikiran Soekarno, mengenai 'kebudayaan'. Terlepas dari realitas bahwa kebangsaan Indonesia beragam suku termasuk keyakinan di dalamnya, namun gagasan mengenai kebudayaan tidak bisa disamakan dengan Ketuhanan. Singkatnya, TUHAN tidaklah sama dengan kebudayaan. Kesadaran kebudayaan itu lahir dari manusia, sama halnya kesadarannya beragama atau ekspresi hubungan TUHAN-manusia. Sebenarnya ini merupakan penekanan pada kemanusiaan, yang akan secara tajam membedakan secara ontologis antara TUHAN dan manusia.²²

Dengan meminjam analisis Hick, perkara Yang Transenden (baca: TUHAN), sudah dilihat dari berbagai sisi, termasuk dua sudut interpretasi yang bersifat naturalistic dan religious. Seseorang dapat menunjukkan kesadarannya akan Ketuhanan secara alami, tetapi bisa juga secara kelompok melalui konfesi-konfesi agama sebagai sebuah lembaga yang dikreasi oleh manusia itu sendiri.²³ Keduanya, tentu saja, tidak dapat dihindari; dan, ini merupakan sebuah kenyataan yang hidup dalam kebangsaan Indonesia. Ketuhanan dalam sila pertama ini memerlukan keseimbangan antara pengenalan akan Yang Maha Esa dan praksis. Manusia Indonesia tidak dapat melampaui Ketuhanan itu, tetapi mereka dapat mendemonstrasikannya dalam praksis yang nyata. Dengan jalan demikian, jebakan eksklusivisme agama bisa dihindari sehingga ideologi atau dasar negara ini tetap terpelihara dan hidup dalam kebhinekaan.

Sejak rumusan sila pertama "Ketuhanan Yang Maha Esa" ini final, maka tidak terbuka lagi peluang untuk mendiskusikan perubahan dasar atau ideologi negara, dengan asumsi kebangsaan atas dasar perasaan 'mayoritas'. Karena semua unsur kebangsaan dibangun di atas dasar kesetaraan (kemanusiaan). Semua warga negara dipersilakan untuk hidup dalam nilai Ketuhanan itu dan kebangsaan tidak mengekangnya.

Sila Ketuhanan berada dalam bingkai perjalanan sejarah (historis atau berkeseluruhan) yang panjang, dengan keberagaman atau pluralis (bhineka) dan dengan iman kepada TUHAN Yang Maha Esa yang berkeberadaan (ontologis/teologis). Dalam perjalanan panjang sejarah berdirinya bangsa Indonesia, perumusan dasar negara yang dilakukan oleh para pendiri bangsa ini merupakan sebuah upaya kolektif yang mengurus tenaga, pikiran, dan emosi. Tidak jarang terlihat adanya perbedaan yang signifikan dari perumusan itu. Namun, perbedaan bukan sebuah hal yang disengaja, melainkan timbul dari kenyataan yang harus diterima bahwa para perumus (Panitia) terdiri atas kelompok-kelompok yang berbeda juga.

²⁰ Dewantara, *Diskursus Filsafat Pancasila*.

²¹ A.A. Yewanggoe, *Umat Kristen Indonesia Dan Pancasila* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2021), 67.

²² Yewanggoe, *Umat Kristen Indonesia Dan Pancasila*.

²³ John Hick, *An Interpretation of Religion: Human Responses to the Transcendent, The Modern Schoolman*, vol. 68 (Hampshire/London: Macmillan Press Ltd, 1989), 1.

Keberagaman itulah yang mempertajam Pancasila, secara khusus sila pertama. Kurang tepat jika diasumsikan bahwa dalam perumusan dasar negara hanya melibatkan dua kelompok besar yang berhadap-hadapan: keagamaan dan kebangsaan. Seolah-olah tidak kelompok kebangsaan tidak berkeyakinan. Demikian juga sebaliknya, kelompok keagamaan tidak berkebangsaan. Kedua kelompok ini terdiri atas kelompok suku, budaya, bahasa, dan keyakinan yang berbeda-beda. Namun sila pertama ini mempertemukan keberagaman khas Indonesia, bukan nilai-nilai dari bangsa lain, di luar Indonesia.

Pada akhirnya, keyakinan atau iman menarik perhatian lebih dari para pendiri bangsa ini. Tidak ada maksud dari satu orang atau sekelompok orang yang menolak adanya keyakinan atau iman kepada TUHAN. Yang ada adalah sebuah tantangan untuk merumuskan dalam sebuah konfesi teologi kebangsaan yang menggarisbawahi keberadaan-Nya. TUHAN ada. Cara memandang ke-ada-an (bukan situation, melainkan being) TUHAN, sayangnya ditarik sangat jauh ke dalam kepentingan kelompok.

KESIMPULAN

Pembahasan ini menekankan tentang sila pertama sebagai sebuah pengakuan bahwa bangsa Indonesia memiliki prinsip kebangsaan yang teologis yang menjadi titik temu pemersatu, bukan titik tengkar pemecah belah. Tidak menjadi soal pada sila berapa kemudian Ketuhanan itu berada dalam rumusan Pancasila. Karena itu tidak akan mengubah sejarah. Yang menjadi sangat penting adalah bangsa yang merdeka adalah kebangsaan yang menjunjung tinggi Ketuhanan dan kemanusiaan secara bersama-sama. Secara personal, setiap insan Indonesia berkeyakinan dalam keyakinannya yang merdeka kepada TUHAN, dan juga bersikap manusiawi kepada sesamanya. Penelitian ini merupakan sebuah penggalian atas kekuatan dari sila pertama Pancasila yang menjadi titik temu kebangsaan. Arus keberagaman kebangsaan itu bermuara pada satu kesadaran akan tidak semestinya Ketuhanan ini memecah belah atau mendeskriminasi anak-anak bangsa, melainkan menyatukan dan mengangkat harkat manusia yang ber-TUHAN dan berbangsa.

REFERENCE

- Arif, Syaiful. "Kontradiksi HTI Atas Pancasila." *Jurnal Keamanan Nasional* 2, no. 1 (2016): 19–34.
- Dewantara, Agustinus W. *Diskursus Filsafat Pancasila*. Yogyakarta: PT Kanisius, 2017.
- Hajri, Wira Atma, Zulherman Idris, and Masriko Riantono. "Meluruskan Penafsiran Tentang Pancasila." *WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi* 5, no. 2 (2019): 50–57.
- Hakam, Saiful. "The Interpretation of the First Verse [Ketuhanan Yang Maha Esa] of Pancasila." *Jurnal Ilmu Agama: Mengkaji Doktrin, Pemikiran, dan Fenomena Agama* 18, no. 1 (2017): 1–10.
- Hearn, Jonathan. *Rethinking Nationalism: A Critical Introduction*, 2006.
- Hick, John. *An Interpretation of Religion: Human Responses to the Transcendent. The Modern Schoolman*. Vol. 68. Hampshire/London: Macmillan Press Ltd, 1989.
- Maula, M. Iqbal. "Pandangan Muhammad Rizieq Shihab Tentang Pancasila." *Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama* 2, no. 2 (2020): 71–88.
- Moseley, Carys. *Nations and Nationalism in The Theology of Karl Barth*. Oxford: Oxford University Press, 2013.
- Mukhlis, Febri Hijroh. "Teologi Pancasila: Teologi Kerukunan Umat Beragama." *Fikrah* 4, no. 2 (2016): 171.

- Novalina, Martina. *Di Bawah Kepak Sayap Sang Garuda (Pemahaman, Sikap Dan Tindakan Fundamental Keber-Agama-an Dalam Bingkai Pancasila)*. Edited by Tim STT Ekumene. 1st ed. Jakarta: Rehobot Literature, 2018.
- Saragih, Erman Sepniagus. "Analisis Dan Makna Teologi Ketuhanan Yang Maha Esa Dalam Konteks Pluralisme Agama Di Indonesia." *Jurnal Teologi Cultivation* 2, no. 1 (2018): 1–14.
- Smith, Anthony D. *Nationalism: Theory, Ideology, History*. 2nd Editio. Cambridge, UK: Polity Press, 2010.
- Yewanggoe, A.A. *Umat Kristen Indonesia Dan Pancasila*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2021.
- "Begini Ucapan Eggi Sudjana Yang Dianggap Bisa Membuat Kegaduhan - Nasional Tempo.Co."
- "Eggi Sudjana: Trinitas Kristen Bertentangan Dengan Sila Pertama Pancasila."
- "Perjalanan Kasus Penghinaan Pancasila Rizieq Syihab | Kumparan.Com."
- "Piagam Jakarta: Isi Dan Kontroversinya Halaman All - Kompas.Com."